

SUBJEK PETANI DALAM WACANA PEMBANGUNAN DI MANGGARAI

Venansius Haryanto

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi, Universitas Gadjah Mada
venanharyanto@yahoo.com

Abstract: *This study aim to trace how development discourse consturct the subject as peasant in Manggarai-NTT. This study found two important things. On One Side, development and all its principles try to representate subject as peasant in certain manner. On the other side, there are resistance narratives of subject as peasant to the way of how system representing them in development. This study took place in Lembor-West Manggarai Regency of NTT Province, that supposedly known as granary of NTT and national. This study used the concept of relation of power, subject and discourse in post-structuralist lens as analytical framework.*

Key words: *Development discourse, Peasant, Post-development and Depoliticization*

PENDAHULUAN

Berbicara seputar pem-bangunan dalam ilmu sosial umumnya terkonsentrasi pada dua cara pandang ini. Pertama, cita-cita akan kemajuan, kesejahteraan, terbebas dari jeratan kemiskinan sebagai janji emas pembangunan. Dalam cara pandang ini pembangunan mendapat imaji yang positif yaitu terkait dengan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya (Fakih, 2002: 10). Kedua, berbeda dengan

cara pandang di atas, pendapat lain mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri merupakan suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi atau teori tertentu tentang suatu perubahan sosial (ibid). Terkait pendapat kedua ini, pembangunan seringkali dipahami sebagai proses penanaman institusi dan nilai-nilai Barat atas negara-negara Selatan (dunia ketiga) yang dianggap layak untuk diintervensi melalui pembangunan (Hettne, 2009: 2).

Pertanian sebagai sektor penting penyokong kesejahteraan, sudah

tentu menjadi target utama pembangunan. Untuk itu, prinsip-prinsip pembangunan seperti produktivitas, efisiensi, modernisasi gencar dipromosikan sebagai penunjang kesejahteraan rakyat di negara-negara dunia ketiga. Namun, lagi-lagi dalam bingkai kapitalisme, pembangunan pada sektor pertanian dibaca tidak lebih dari sebuah cara untuk semakin memperkuat pengaruh ideologi kapitalisme ke banyak negara.

Banyak kajian yang coba membongkar kedok beroperasinya kuasa melalui pembangunan sektor pertanian yang menyebabkan eksploitasi, dominasi atas diri petani di negara-negara berkembang. Studi-studi yang dilakukan di sejumlah negara berkembang seperti negara-negara di Afrika, Filipina dan Meksiko (Bello, 2009: 40, 56, 69) memperlihatkan adanya penyesuaian struktural internal dalam negara sebagai efek kebijakan pembangunan neoliberal dalam sektor pertanian. Hal ini pun berdampak pada menyusutnya peran negara dalam bidang pertanian, karena telah diambil alih oleh lembaga-lembaga

internasional yang diinisiasi oleh negara-negara maju. Studi-studi ini mengangkat ke permukaan keterhimpitan hidup sebagai petani kecil (family peasant) di tengah kepentingan pasar global. Untuk konteks Indonesia, studi pustaka yang dilakukan oleh Dawam Raharjo yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja* (1990) sebagian besar membahas bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh para petani di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan liberalisasi pertanian.

Di samping cerita ekspansi ideologi pembangunan, pada prosesnya pengaruh kapitalisme dalam dunia pertanian juga mendapat resistensi serius dari berbagai gerakan yang berbasis pada prinsip-prinsip sosialis-komunis (Krisna, 2009: 35-36). Di Cina misalnya, kesuksesan revolusi petani membuktikan kekuatan komunis yang cukup berpengaruh di negara tersebut. Di negara lain seperti Korea Utara juga membuktikan bahwa konsolidasi komunisme pada awal 1950 muncul dalam rupa

pemberontakan petani. Gerakan kiri anti-kapitalist juga banyak bermunculan di berbagai daerah di India (Telengana, Bengal, Kerala); Asia Tenggara (Laos, Kamboja, Vietnam, Burma, Malaya, sebagian dari Thailand, Indonesia dan Filipina) dan juga sebagian besar di negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Di beberapa negara, Ideologi komunis juga menguat bersama dengan gerakan nasionalisme di negara-negara dunia seperti Revolusi Kuba pada tahun 1959 dan kemunculan Che Guevara sebagai ikon pemberontakan petani melawan kekuatan kapitalis di Amerika Latin pada tahun 1960.

Terkait pembangunan pada sektor pertanian, berkat kehadiran lokasi persawahan Lembor di Kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT mendapat predikat istimewa sebagai lumbung padi nasional. Persawahan Lembor yang dicetak pada tahun 1982 dengan luas lahan sekitar 3000 hektar ini merupakan lokasi persawahan yang terluas di NTT hingga saat ini. Persawahan yang dibangun sebagai bagian penting dari ideologi pembangunan Orde Baru

ini, diyakini mampu membebaskan masyarakat NTT dari situasi kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan kala itu.

Namun kerja representasi subjek petani melalui pembangunan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang melahirkan cerita-cerita resistensi. Pada satu sisi terdapat cerita mengenai kerja representasi subjek petani melalui pembangunan dan pada sisi yang lain terdapat subjek petani yang menyatakan resistensi terhadap cara pembangunan merepresentasikan diri mereka. Kurang lebih dalam nafas gagasan inilah studi ini dilakukan untuk lebih jauh mengkritisi kerja pembangunan dalam merepresentasikan subjek petani.

Untuk membedah hal ini, studi ini menggunakan perspektif hubungan antara kuasa, subjek dan wacana dalam lensa pemikiran poststrukturalist. Demi keruntutan pembahasan dalam membedah persoalan ini, tulisan ini akan mengikuti beberapa alur gagasan berikut: (1) pendahuluan singkat yang mengulas tentang latar

belakang dari tulisan, (2) abstraksi teoritis terkait hubungan antara kuasa, subjek dan wacana dalam perspektif poststrukturalist (3) Representasi subjek petani dalam wacana pemangunan (4) Resistensi subjek petani dalam wacana pembangunan dan (5) tulisan ini akan ditutup oleh sebuah kesimpulan singkat.

Kuasa, Subjek Dan Wacana: Landasan Teoritis

Telaah Michael Foucault mengenai konsep *power* (kekuasaan) melahirkan pemahaman baru dalam memahami kekuasaan. Menurut para penstudi Foucault, melalui teorinya, Foucault berusaha menjauhkan diri dari konsep yang apriori mengenai kekuasaan (Kelly, 2009: 34). Karena itu konsep kekuasaan Foucault tidak sedang menggarap pertanyaan “apa itu kekuasaan (what power is)” tetapi pada sebuah pengakuan akan kekuasaan yang bukan merupakan sesuatu yang substantif, melainkan sesuatu yang cair yang mengalir dari sini ke situ. Kekuasaan tidak melekat pada agen tertentu seperti individu-individu atau negara atau kelompok-

kelompok dengan kepentingan-kepentingan tertentu tetapi ia tersebar dalam segala praktik-praktik sosial yang berbeda-beda (Jorgensenn & Philips, 2002: 13).

Kekuasaan dalam perspektif Foucault tidak secara eksklusif dipahami sebagai sesuatu yang opresif tetapi justru dipahami sebagai sesuatu yang produktif (ibid). Kekuasaan menurut Foucault selalu beriringan dengan kerja pengetahuan dalam membentuk subjek. Dengan memberi penekanan pada peran pengetahuan dalam beroperasinya kekuasaan, Foucault secara jelas menghubungkan kekuasaan dengan konsep wacana (*discourse*). Konsep Foucault mengenai wacana sangat diperlukan dalam memahami peran “kekuasaan” dalam memproduksi pengetahuan (McHoul & Grace, 1993: 57).

Dengan mengikuti alur penjelasan di atas, Foucault pun pada gilirannya menempatkan subjek yang selalu terkontruksi dalam sebuah wacana. Subjek menurut Foucault tidak mempunyai pusat (decentered subject) (Jorgensen & Philips, 2002: 15). Konsep ini oleh Foucault

diturunkan dari konsep Athusser mengenai mengenai subjek, di mana subjek oleh Athusser selalu dipahami dalam keterhubungannya dengan ideologi. Bahwasannya individu-individu menjadi subyek ideologis melalui sebuah proses interpelasi yaitu dengan jalan mana sebuah wacana terhubung dengan individu sebagai seorang subyek. Singkat kata, kekuasaan dalam perspektif Foucault adalah berbicara tentang relasi-relasi kekuasaan dalam memproduksi kebenaran yang di mana di dalamnya individu-individu mendapatkan pemaknaan dirinya sebagai seorang subyek.

Gagasan dasar Foucault ini menginspirasi banyak penstudi post-development belakangan ini yang menempatkan pembangunan sebagai wacana. Melalui epistemologi ini, para penstudi post-development berusaha menyingkap praktik dominasi, eksploitasi dan subjugasi yang beroperasi melalui pembangunan. Dalam kajian ini, inspirasi gagasan Foucault dan aplikasinya dalam studi-studi pembangunan akan dipakai untuk membaca bagaimana kuasa

pembangunan beroperasi melalui pembangunan yang melahirkan praktik dominasi, eksploitasi dan subjugasi terhadap petani. Dalam tulisan ini, hal ini dibaca sebagai cara kerja pembangunan merepresentasikan subjek petani.

Sementara itu para pemikir poststrukturalis yang lain seperti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe membedakan antara *subject position* dan *political subjectivity* dalam menjelaskan posisi subyek dalam medan diskursif pada satu sisi dan agensi subyek pada sisi lain (Howarth, et. al. 2000: 12). Konsep ini terutama dipengaruhi oleh psikolanalisis Lacan dalam benturannya dengan konsep subyek yang ditawarkan dalam aliran fenomenologi dan juga subyek yang dipahami oleh teori pilihan rasional.

Secara singkat, subjek dalam lensa psikoanalisis Lacan ditempatkan sebagai subjek yang mengalami keterpecahan, teralienasi, karenanya menjadi locus dari ketidakmungkinan sebuah identitas (*impossible identity*). Karena itu, subjek Lacanian adalah selalu merupakan “subjek yang kurang”

(lacking subject), karenanya selalu berusaha mengidentifikasi diri dengan struktur tertentu. (Stavrakakis, 1999: 13). Subyek Lacanian menjadi sangat relevan dengan diskusi filsafat mengenai politik karena ia tidak dikunci pada paham subyek sebagai individu atau “subyek konsensus” seperti yang dipahami dalam wacana sehari-hari, tetapi justru dibenturkan dengan paham subyek dalam tradisi Anglo-Amerika, di mana sebagian besar dari teori ini mereduksi subyektivitas pada paham ego (Stavrakakis, 1999:17).

Selanjutnya, dalam alur pikiran yang kurang lebih sama dengan subyek Lacanian, Laclau dan Mouffe juga melanjutkan proyek subjek yang sebelumnya telah digarap Foucault. Laclau dan Mouffe misalnya mencari jalan tengah atas pertentangan kritik Althusser atas subjek yang transparan, serentak pada saat yang sama menolak tendensi determinatif dalam subjek Althusserian. Dalam menjembatani ketegangan ini, Laclau dan Mouffe memperkenalkan dua konsep penting yaitu *subject position* dan *political*

subjectivity. Dipengaruhi oleh konsep Foucauldian, *subject position* hendak menjelaskan posisi subjek dalam berbagai medan diskursif, sedangkan *political subjectivity* hendak menjelaskan tindakan subyek yang lahir dari kontingensi struktur-struktur diskursif (ibid). Aliran poststrukturalis yang juga menyebut dirinya sebagai aliran post-fundasionalisme membangun gagasannya di atas konsep kontingensi dari “the social”. Melalui konsep ini, gagasan poststrukturalis mengklaim ketidakmungkinan akan adanya dasar yang final dari “the social”. Namun hal ini tidak berarti secara total absennya dasar dari “the social”, tetapi hendak menandakan prinsip kontingensi sebagai status ontologis dari “the social” (Marchart, 2007: 2).

Pada titik ini, konsep dislokasi menjadi term yang sangat penting untuk menjelaskan karakter kontingensi dari struktur-struktur diskursif. Dislokasi oleh Laclau dan Mouffe dipakai untuk menjelaskan krisis yang senantiasa ada dalam suatu struktur diskursif yang menjadi

dasar dari proses identifikasi subyek ke suatu struktur diskursif.

Dalam kajian ini, konsep subjek Laclau-Mouffe dijadikan sebagai dasar epistemologi dalam menjelaskan resistensi subjek petani terhadap kerja pembangunan yang selama ini cenderung dominatif dan eksploitatif. Namun dalam studi ini, resistensi subjek petani lebih jauh dikritisi dengan selalui mencurigai apakah resistensi tersebut sungguh keluar dari sistem yang ada atau justru rentan terbajak kembali oleh sistem yang ada.

Dalam Bayang-Bayang Revolusi Hijau

Masuknya pertanian modern di Manggarai, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang berefek pada arah pembangunan pertanian nasional kala itu. Momen yang sekiranya menjadi *point of departure* adalah perkembangan *food regime* pada era setelah perang dunia kedua, di mana modernisasi muncul sebagai penanda baru dalam menggarap sektor pertanian. Kajian-kajian ekonomi-politik terkait *food politic* menempatkan era 1950an

hingga 1970an sebagai era kedua *food regime* yang ditandai dengan industrialisasi pertanian di negara-negara dunia ketiga (McMichael, 2009: 141-142; Bello, 2009: 27). Pada era ini pembangunan pertanian di negara-negara dunia ketiga ditandai dengan industrialisasi serta pentingnya mengikuti anjuran-anjuran sebagaimana yang disampaikan dalam doktrin revolusi hijau.

Aliran poststrukturalis yang juga menyebut dirinya sebagai aliran post-fundasionalisme membangun gagasannya di atas konsep kontingensi dari “the social”. Melalui konsep ini, gagasan poststrukturalis mengklaim ketidakmungkinan akan adanya dasar yang final dari “the social”. Namun hal ini tidak berarti secara total absennya dasar dari “the social”, tetapi hendak menandakan prinsip kontingensi sebagai status ontologis dari “the social” (Marchart, 2007: 2).

Seperti halnya dengan negara-negara dunia ketiga lainnya (Amerika Latin dan Sub Sahara Africa), Indonesia pada era awal Orde Baru sangat serius menata

sektor pertanian. Pembangunan pertanian pada waktu itu merupakan paket utama dari Repelita I, II dan III yang bertujuan untuk mengupayakan swasembada pangan di Indonesia. Dalam Repelita II (1974-1979), misalnya, kebijakan pokok pertanian mencakup: intensifikasi dan ekstensifikasi; peningkatan pengadaan bibit unggul untuk jenis tanaman utama; penyempurnaan sistem dan perluasan penyediaan kredit bagi petani dan penyakap; penyempurnaan sistem pengadaan dan distribusi sarana produksi dan peningkatan penyediaan prasarana produksi baik fisik maupun kelembagaan. Repelita III pun melanjutkan agenda besar sebelumnya yang mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi (Mubyarto, 1987: 42-44). Dalam *grand design* revolusi hijau, program Bimas (bimbingan masyarakat) pun dirancang yang menjadikan desa sebagai konsentrasi garapan pada tahun 1972-1973 (Antlov, 2002: 56). Bimas dalam hal ini merupakan paket subsidi dari pemerintah dalam bentuk pestisida, insektisida, pupuk

kimia, kredit dengan bunga rendah, dan bibit padi unggul.

Sebagai bagian dari garapan pembangunan Orde Baru, garapan pembangunan persawahan di Lembor mulai digarap serius pada masa pemerintahan Frans Sales Lega (1968-1978). Garapan serius pada pembangunan sektor pertanian di Manggarai dimulai ketika terjadi proses negaraisasi pemerintahan lokal di Manggarai pada tahun 1958. Hal ini ditandai oleh momen penting pada 17 Juni 1962 yaitu ketika terjadi pertemuan antara Pemda Manggarai dengan kedua Dalu bertempat di Daleng yang menghasilkan keputusan/ Pernyataan bersama yang isinya antara lain penggalian saluran, pembuatan bendungan bronjong sekaligus pembagian jatah tanah kepada anggota masyarakat yang terdiri atas 1484 orang anggota proyek yang tersebar di 9 desa sedaratan Lembor. Signal awal pembangunan pertanian ini sudah dimulai ketika pada tahun 1962, di mana sekelompok masyarakat yang beranggotakan 37 orang yang diketuai T.H. Nanur, Frans Hambur, D. Jegaut yang

berusaha untuk menggali Wae Sele untuk areal sawah tadah hujan di *Lingko* Leba dan Lus. Hasilnya, tepat pada Juni 1962 rombongan Pemda yang diketuai A. Geong datang mengunjungi Daleng. Pada kesempatan tersebut terjadilah kesepakatan antara Dalu Wontong dan Dalu Bajo. Perlu diketahui bahwa Dalu Wontong dan Dalu Bajo merupakan dua pemerintahan lokal sebagai pemilik lahan persawahan Lembor. Kesembilan desa yang mendapat jatah lahan dari persawahan Lembor adalah Desa Daleng (218 anggota), Desa Wae Kanta (262 anggota), Desa Wae Bangka (250 anggota), Desa Tangge (229 anggota), Trans Karot (51 anggota), Desa Surunumbeng (217 anggota), Desa Munting (63 anggota), Desa Wae Wako (113 anggota), Desa Joneng (81 anggota). (Bdk. LintasTimur. *Pesona NTT: Nusa TenunTangan*. Edisi Juli-Oktober 2013. Labuan Bajo: Sun Spirit).

Ketika pada tahun 1968, Frans Sales Lega (1968-1978), menjabat sebagai bupati Manggarai, corak bertani modern kian gencar

diperkenalkan di Manggarai. Bupati Lega yang oleh sebagian besar orang Manggarai hingga sekarang ini dikenal sebagai Bapak pembangunan melanjutkan program percetakan persawahan yang telah dirintis sebelumnya oleh beberapa pendahulunya seperti Raja Tamoer, Raja Bagoeng (1924-1930), Raja Baroek (1931-1949) dan Raja Ngambut (1949-1960), Kraeng Charolus Hambur bupati pertama Manggarai (1960-1967). Bupati Lega selanjutnya mempermanenkan saluran-saluran irigasi tersebut menjadi lokasi persawahan. Bersamaan dengan mimpi besar swasembada pangan orde baru yang terselenggara sepenuhnya dalam proyek revolusi hijau, pada era 80-an, ketika Manggarai dipimpin oleh Frans Dula Burhan (1978-1989), Lembor akhirnya dikenal sebagai Lumbang Padi NTT. Mulai saat itu, cara bertani modern dengan segala prinsipnya sudah kian digencarkan di persawahan Lembor. Narasi sejarah di atas sesungguhnya hendak berbicara tentang apa? Ketika ditempatkan dalam cara baca pembangunan sebagai wacana,

sejarah pembangunan persawahan Lembor merupakan sejarah sebuah wacana yaitu bagaimana kejelataan, keterbelakangan dan kemiskinan orang Manggarai dipertemukan dengan janji kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan yang ditawarkan oleh pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam arti ungkapan bahasa daerah berikut “*Cecer Mese NTT,*

Langkok Flobamor, kudu mose taung roeng, kudu wur sangged rucuk, condas taung kolang (Lambung besar NTT, lungbung Flobamor, untuk menghidupkan semua rakyat, menghilangkan semua yang busung lapar dan menghepas kepanasan) (wwcr. dengan Bpk Pit Pandi).

Gambar 1.



Pembangunan persawahan Lembor, dalam arti tertentu menandakan masuknya garapan pertanian modern di Manggarai. Hal ini pun menjadi sangat menarik jika dibenturkan dengan cara bertani orang Manggarai yang dibangun kuat

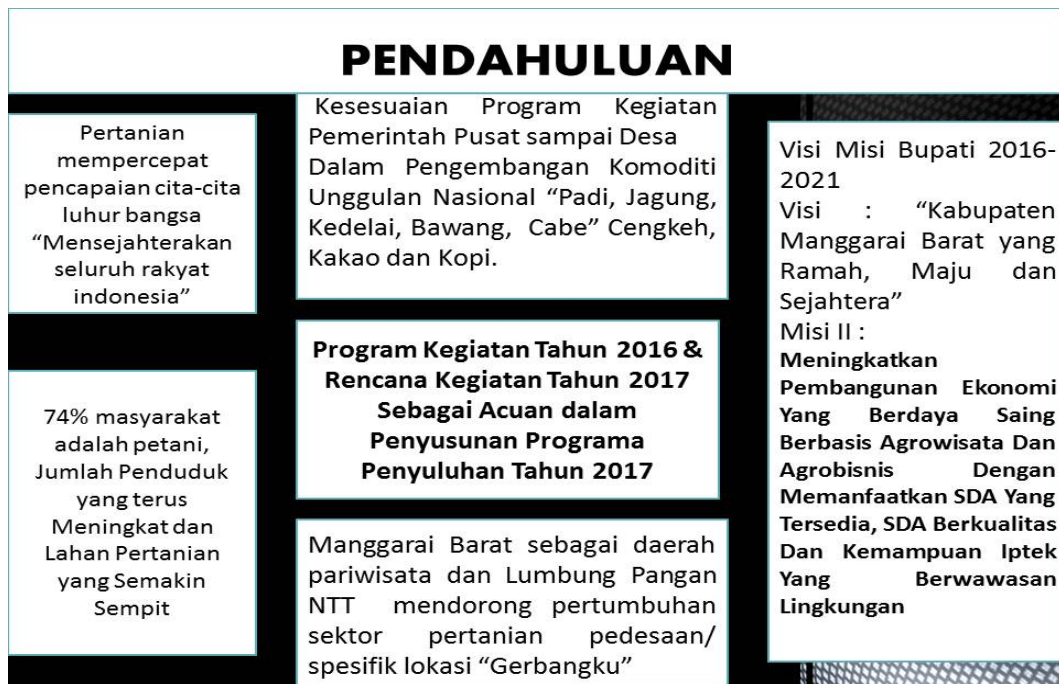
di atas dasar nilai-nilai kearifan lokal. Kajian antropologis Maribeth Erb (1999:51) misalnya, memperlihatkan hubungan erat antara orang Manggarai dengan aktivitas bertani. Lahan garapan bagi orang Manggarai merupakan

lambang kolektivitas dalam satu kampung (*beo*). Aktivitas bertani dalam hal ini dibangun di atas dasar komunalitas yang dalam bahasa setempat disebut dengan *uma lodok ata do* (kebun ulayat) (Nggoro, 2013: 39).

Lantas, pembangunan di persawahan Lembor sekarang ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pembangunan

lain yang menjadi bagian penting dari penyangga ekonomi masyarakat Manggarai. Untuk konteks Manggarai Barat, pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilepaspisahkan dari garapan sektor pariwisata. Hal ini pun terlihat jelas dari apa yang menjadi target dari utama dari pembangunan pertanian di Manggarai Barat dalam bagan berikut ini.

Gambar 2.



Sumber: Program Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun 2017

Jelas kiranya bahwa pembangunan pertanian di Manggarai Barat belakangan ini, terlebih khusus pembangunan pada sub sektor tanaman pangan,

semuanya diarahkan untuk mendukung penuh Manggarai Barat sebagai Kabupaten Pariwisata.

Bertolak dari tujuan utama ini potensi persawahan Lembor yang

terdiri dari Lahan Basah seluas 3.179 hektar terdiri dari Irigasi teknis : 2.896 hektar, Irigasi ½ teknis : 81 hektar, Irigasi sederhana: 192 hektar, sepenuhnya digarap untuk mendukung pariwisata. Persis pada titik ini pembangunan pertanian dengan begitu masif menyerap prinsip-prinsip pasar yang tertuang dalam sederetan kata seperti agribisnis, produktivitas, efisiensi dan sebagainya. Kondisi inilah yang kemudian memberi konteks bagi proses bagaimana pembangunan meangartikulasikan subjek petani di Manggarai Barat yang akan diulas pada bagian berikut.

Pembangunan Dan Representasi Subjek Petani

Bagian ini menguraikan bagaimana kerja pembangunan dalam merepresentasikan subjek petani di Manggarai. Cara Pembangunan merepresentasikan subjek petani akan dibahas dalam empat point penting dengan mengacu pada struktur wacana pembangunan yang diabstraksikan oleh Aram Ziai (2015) dalam empat point penting yang mencakup formasi objek,

formasi modalitas penyampaian, formasi konsep dan formasi strategis. Keempat hal ini, merupakan cara wacana pembangunan merepresentasikan subjek petani.

Pertama, Pertanian kita itu: Kurang ini dan Kurang itu

Formasi objek biasanya objek dalam wacana pembangunan dilukiskan dalam satu kata yang disebut *underdevelopment* yang secara harafiah bisa diterjemahkan sebagai kondisi keterbelakangan, kemiskinan atau kekurangan. Kondisi *underdevelopment* ini termanifestasi dalam data-data yang menggambarkan level pembangunan dalam suatu daerah yang menyasar baik masyarakat sebagai sasaran pembangunan maupun negara, dalam hal ini birokrasi sebagai mesin utama pembangunan.

Sub-judul di atas mengangkat ke permukaan bagaimana petani sebagai objek pembangunan diartikulasikan dalam wacana pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa naturalisasi wacana pembangunan dibangun dengan upaya terus-menerus

memproblematisasi subjek petani sebagai objek pembangunan. Problematisasi, sedemikian sehingga membawa dua efek sekaligus. Pertama, norma-norma atau kriteria-kriteria pembangunan pertanian seolah-olah natural atau benar adanya. Kedua, petani terus ditemukan dalam rumusan “kurang ini-kurang itu” yang dilihat semata sebagai penyimpangan dari prinsip atau kriteria pembangunan.

Tidak sulit untuk melacak bagaimana *discourse* pembangunan dibangun di atas deskripsi kondisi *underdevelopment* masyarakat Manggarai pada khususnya dan NTT pada umumnya. Beroperasinya *logic* ini dengan mudah terlacak dari data-data statistik seperti Kabupaten dalam Angka atau juga data Bapenas terkait dengan indeks pembangunan setiap provinsi. Dalam perspektif Foucauldian, data-data berupa statistik seperti ini, berperan sebagai teknologi kekuasaan untuk terus memastikan urgennya intervensi pembangunan atas suatu masyarakat.

Data Bapenas, misalnya, memperlihatkan posisi NTT yang

berada pada posisi buncit dalam sejumlah indikator pembangunan pada level nasional. NTT, bersama provinsi lain seperti Papua dan Papua Barat berada pada posisi tiga terakhir berdasarkan beberapa indikator pembangunan. Presentasi penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), NTT menempati posisi kedua dari akhir bersama dengan provinsi Papua (data dari Bapenas). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi (Rp. 364.290 per kapita per bulan untuk perkotaan dan Rp. 281.002 per kapita per bulan untuk pedesaan pada Maret 2015) masih tinggi yaitu sebesar 22,61 persen. Angka kemiskinan NTT secara berangsur-angsur menurun namun secara nasional, angka persentase kemiskinan di NTT masih berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia sebelum Papua dan Papua Barat. IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian

tingkat pendidikan (Angka rata-rata Lama Sekolah), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup Bdk. Laporan Nasional: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi tahun 2014. Kementrian PPN/Bapennas.

Hal yang sama juga terjadi pada performa birokrasi sebagai apparatus pembangunan, di mana Provinsi NTT masuk dalam kategori terburuk dalam tata kelola pemerintahan, dengan menempati peringkat 30 dari 33 Provinsi di Indonesia. Menurut peneliti Partnership di Provinsi NTT Zarniel Woleka,SH, hasil pemeringkatan lima teratas Indonesia Governance Indeks (IGI), sebelumnya Partnership Governance Indeks (PGI), Tahun 2012-2013 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim

(6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima Provinsi terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77) Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41). Pengukuran keempat sektor tersebut telah diukur dengan menggunakan 6 (enam) Parameter Good Governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas.

Berbiak di atas asumsi yang sama, garapan pembangunan di level Kabupaten pun bersumber sepenuhnya pada data-data statistik yang mempresentasikan keadaan masyarakat dalam capaian angka-angka pembangunan. Untuk tujuan ini, data-data seperti Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka, yang digarap oleh setiap SKPD berisikan bagaimana masyarakat Manggarai dikonstruksi sebagai subjek yang hendak dibentuk melalui prinsip-prinsip pembangunan. Dalam data Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka misalnya, dihadirkan informasi-informasi mengenai sektor-sektor pembangunan strategis seperti pertanian yang mencakup tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan; sektor industri yang mencakup industri pengolahan dan kerajinan, listrik dan air minum, pertambangan; sektor perdagangan, sektor perhubungan dan keuangan dan harga. Membuka data Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka (2012) atau Data Statistik Manggarai Barat (2014), misalnya, kita akan disuguhkan oleh berbagai informasi terkait dengan bagaimana pembangunan digarap.

Lebih khusus, kebijakan-kebijakan pembangunan yang menysasar petani pun dibangun di atas *logic* ini. Pembangunan dalam sektor pertanian misalnya dibangun di atas analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1.

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Posisi lahan sawah berpengairan 10.588 ha terdiri sawah irigasi dan sawah tadah hujan;	Kabupaten Manggarai Barat termasuk daerah beriklim campuran tropis basah dan kering;
Potensi sawah besar ada di Kec. Lembor, Kuwus dan Macang Pacar; Masih tersedia lahan pertanian seluas 130.000 ha yang belum dimanfaatkan;	Sumberdaya lahan didominasi lahan kering dengan tingkat kesuburan rendah;
SDM pertanian, peternakan tersedia; Tersedianya kelompok tani dan nelayan;	Lahan belum dioptimalkan pemanfaatannya;
Lanskap sawah lingko, hutan dan pegunungan berpotensi menjadi obyek wisata;	Kualitas dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih rendah;
Tersedianya informasi hama dan penyakit.	Kurangnya pemberdayaan terhadap petani dan nelayan;
	Masih terbatasnya sarana dan modal bagi petani;
	Belum optimalnya pengolahan pemasaran pasca panen;
	Belum tersedianya hasil pertanian untuk mendukung pariwisata.

Sumber: RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2011-2015

Mencermati analisis SWOT di atas, jelas terlihat bahwa bagaimana formasi pembangunan pada sektor

pertanian dirumuskan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menopang wacana pembangunan.

Point-point pada sisi kekuatan misalnya dirumuskan berdasarkan kriteria-kriteria pembangunan seperti ketersediaan lahan yang cukup untuk menunjang produksi; SDM petani yang disinyalir sudah mencapai standard untuk sebuah pembangunan; fungsi aparatus pembangunan seperti PPL yang menyediakan informasi terkait penyakit/hama yang selama ini dinilai sudah berjalan dengan baik. Sementara itu point-point pada sisi kelemahan dirumuskan sebagai penyimpangan dari kriteria-kriteria pembangunan. Faktor-faktor alam seperti iklim, curah hujan dan kesuburan tanah misalnya dinilai belum memenuhi kriteria-kriteria untuk sebuah pembangunan yang baik; keterbatasan sumber daya petani seperti keterampilan dan modal juga disinyalir belum memenuhi kriteria demi berlangsungnya sebuah pembangunan yang baik; dan juga faktor *governance* dari pemerintah seperti tata kelola pasca panen (pemasaran) dinilai berfungsi dengan baik.

Kedua, PPL yang serba Tahu Problem Petani

Kedua, formasi modalitas penyampaian (*formation of enunciatives modalities*) dalam suatu wacana memperlihatkan dua bentuk subjek posisi: (1) Subjek yang menempati posisi superordinat yang dalam hal ini ditempati oleh individu-individu atau institusi-institusi yang berhak berbicara atas nama pembangunan dan (2) Subjek yang menempati posisi subordinat yang ke atasnya berbagai prinsip pembangunan dialamatkan.

Terkait formasi modalitas penyampaian, kajian ini setidaknya menemukan sejumlah institusi penting yang berbicara mengenai problem pertanian di Manggarai Barat. Institusi-institusi seperti pemerintah yang diwakili BPK-PPL, lembaga-lembaga keuangan dan LSM angkat bicara mengenai problem pertanian di Manggarai khususnya di area persawahan Lembor. Di tangan mereka inilah pengetahuan mengenai bertani direduksi semata sebagai permasalahan teknis. Oleh petani, mereka ini dianggap layaknya

oracle yang menafsir secara tepat atas problem petani. Pada titik ini, pembangunan berhasil menjadi wacana yang hegemonik karena dimungkinkan reproduksi pengetahuan yang terus menyokong *regime of truth* pembangunan oleh lembaga-lembaga ini.

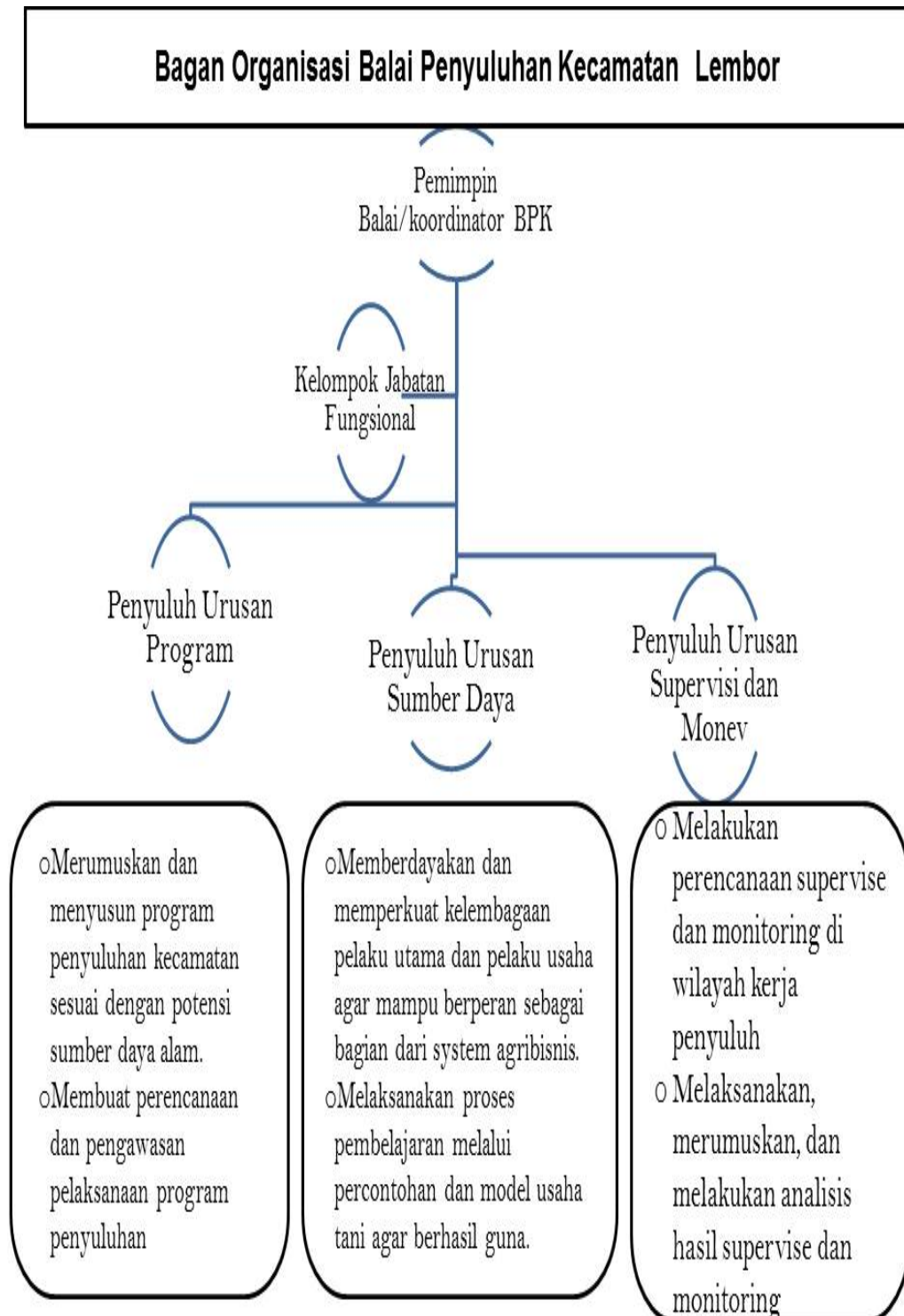
PPL (Pegawai Penyuluh Lapangan), merupakan lembaga teknis yang memainkan peran sentral dalam memastikan para petani untuk terus bekerja di bawah *regime of truth* pembangunan. Dalam relasinya dengan petani PPL menempati subjek posisi sebagai ahli pertanian, berkat (meminjam terminologi Bourdieu) akumulasi modal budaya berupa pengetahuan teknis yang mereka miliki. Sebaliknya dalam relasi ini, petani adalah pihak yang menempati subjek posisi yang senantiasa menghasrati perubahan dengan sepenuhnya mengandalkan pengetahuan teknis PPL. *Stament-stament* mujarab terkait dengan apa itu pembangunan pertanian dan bagaimana ia harus dicapai, boleh

dikatakan menjadi “menu harian” dari para PPL. Subjek posisi yang menggambarkan kepakaran PPL dan kejelataan petani, setidaknya tampak dalam bagan organisasi Balai Penyuluhan (pada gambar 3).

Terlihat jelas bahwa dari bagan di atas, pada satu pihak PPL ditempatkan sebagai pihak yang sepenuhnya menguasai problem petani, dan petani pada pihak lain selalu siap menunggu ujaran kebenaran yang datang dari mulut PPL. Narasi kepakaran PPL dan kejelataan petani terkonformasi oleh seorang petani dalam kutipan wawancara berikut.

Saya paling jengkel dengan orang yang tidak tahu cermin diri, seperti apa diri saya ini. Lebih baik kita ini jadi petani saja. Selama ini pemerintah terlalu baik, banyak bantuan yang mereka berikan baik berupa bantuan materi maupun pelatihan. Kami petani ini yang tidak tahu memanfaatkan semua itu. Sudah tahu bodoh, tidak cermin diri lagi (wwcr. dengan Domi Landu).

Gambar 3.



Sumber: dimodifikasi seperlunya dari Bagan Organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan (Permentan No. 26/Permentan/Ot.140/4/2012) Balai Penyuluhan Kecamatan (Bpk) Lembor.

Kepakaran PPL ini pun semakin *intelligible* dalam kecanggihannya merepresentasikan petani dalam bentuk angka-angka, tabel-statistik

yang menggambarkan produktivitas pertanian. Berikut adalah dua contoh data berupa tabel statistik yang menggambarkan hal tersebut.

Tabel 2

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan	Nama Penyuluh
1	Aleksander Hamsu	Siru	Penggunaan pupuk berimbang pada padi sawah
2	Tarsisius Randung	Repi	Pemeliharaan tanaman padi sawah
3	Silvester Nagot	Ngancar	Persiapan lahan penanaman tanaman sayuran
4	Germanus Agung	Ngancar	Cara membuat RDK/RDKK untuk sistem kredit
5	Primus Nendo	Lalong	Pengendalian hama penyakit pada padi sawah
6	Marselina Jeni	Daleng	Sistim penanaman pasi jajar legowo

Sumber: disadur seperlunya dari data Capaian Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor 2012.

Tabel 3.

Lokasi Kegiatan	Kegiatan	Masalah	Upaya Pemecahan masalah
Suru Numbeng-Lembor	Kunjungan kelompok tani	Produksi padi sawah rendah akibat serangan hama sundep dan hama beluk	Mohon BP2 KP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk intervensi bantuan obat pestisida kepada petani sawah lembor
Siru-Lembor	Kunjungan kelompok tani	Populasi hama dan Penyakit meningkat sehingga produksi padi sangat rendah	Mohon BP2 KP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk intervensi bantuan obat pestisida kepada petani sawah lembor

Sumber: Laporan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS Kabupaten Manggarai Barat Periode 2011

Data-data di atas hanyalah bagian kecil dari sekian banyak data yang digarap PPL yang menggambarkan kepakaran mereka dalam menganalisa problem petani. Sementara itu dari data kedua, kepakaran PPL jelas terlihat dari materi-materi teknis yang mereka tawarkan dalam setiap progam pendampingan para petani.

Studi ini juga menemukan institusi lain di luar pemerintah yang selama ini juga banyak berbicara mengenai pembangunan. Peran ini ditemukan dalam diri lembaga keuangan seperti bank atau juga koperasi. Data Kecamatan Lembor dalam Angka (2014) misalnya mencatat ada sekitar lima koperasi (Suka Damai, Florete, Sangosai, Pintu Air dan Kopdit St.

Familia Wae Nakeng), di samping itu ada tiga Bank (BRI, BNI dan Bank NTT), ini menjadi bagian penting dari proses pembangunan pertanian di daerah tersebut. Lembaga-lembaga ini berandil besar dalam mereproduksi pengetahuan yang menyokong pembangunan yaitu bahwasannya problem utama petani Lembor adalah soal manajemen keuangan. Seorang pegawai koperasi kredit Pintu Air dalam kesempatan promosi koperasi yang dilaksanakan di Lembor berujar seperti ini:

Kenapa pertanian kita di Lembor ini tidak maju. Itu bukan karena salahnya pemerintah, tidak. Itu terutama disebabkan oleh mental kita sendiri. Maunya, apa yang didapatkan hari ini,

langsung segera dihabiskan, tidak pernah pikir untuk menabung. Akibatnya, waktu kita kerja sawah, kita berutang sana-sini. Bahkan hasil panen kita tidak sanggup membayar itu semua. Lantas, bagaimana sudah, maksud kedatangan kami hari ini, mari kita menabung di koperasi pintu air, sehingga ke depannya kita tidak lagi mengeluh ketika kerja sawah, karena kita bisa meminjam dari koperasi. (wwcr. dengan pegawai koperasi)

Jelas kiranya bahwa melalui ulasan di atas, permasalahan petani dalam wacana pembangunan direduksi semata sebagai problem teknis. Persis pada titik ini, mereka yang diklaim sebagai ahli pembangunan berkuasa penuh dalam berbicara mengenai pembangunan, sedangkan petani diposisikan subjek yang siap mengesekusi pengetahuan teknis tersebut.

Ketiga, Tahun lalu Irigasi, Tahun ini juga Irigasi

Dalam wacana pembangunan, konsep-konsep pembangunan disusun, sedemikian sehingga membuat problem atau kegagalan

pembangunan dilihat hanya sebagai bentuk penyimpangan dari janji-janji pembangunan. Dengan kata lain, formasi konsep pembangunan membuat pada satu sisi konsep-konsep pembangunan semakin natural (*taken for granted*), dan kegagalan pembangunan pada sisi lain semata terjadi karena belum terealisasinya janji-janji pembangunan.

Pembangunan tetap menjadi wacana yang hegemonik dengan jalan terus menempatkan problem atau kegagalan pembangunan semata karena belum terrealisasi dengan baiknya janji-janji pembangunan. Studi ini menemukan terbentuknya formasi konsep dalam pembangunan melalui cara aktor-aktor pembangunan dan dokumen-dokumen kebijakan pertanian mengartikulasikan problem petani. Dokumen kebijakan provinsi NTT misalnya dengan sangat jelas memperlihatkan bagaimana *regime of truth* pembangunan mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani.

Gambar 4.



Sumber: Kebijakan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm Pertanian Dalam Mendukung Program Upsus Padi, Jagung, Dan Kedelai. Rakor Upsus NTT 29-30 April 2015.

Dari bagan di atas, tampak jelas bahwa problem pertanian semata terjadi karena tidak terlaksana dengan baiknya janji-janji pembangunan. Dalam hal ini, akar utama dari problem petani di NTT adalah tidak berfungsi dengan baiknya prinsip *governance* (tata kelola) dalam pembangunan pertanian seperti yang tertuang dalam kelima point tersebut. Karena itu jalan keluar yang harus ditempuh adalah mengupayakan tata kelola kebijakan pertanian yang baik. Senada dengan apa yang dirumuskan pada level Provinsi, dokumen-dokumen di Kabupaten pun seperti

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat (2011-2015) juga memperlihatkan beroperasinya cara berpikir tersebut. Dokumen ini, misalnya, merumuskan bahwa akar dari problem yang dihadapi oleh petani di Manggarai adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian. Peliknya masalah yang dihadapi oleh petani terjadi karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Diklaim bahwa petani di Manggarai Barat memiliki modal usaha yang relatif rendah dan

kemampuan untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga permodalan/keuangan formal sangat rendah. Di samping itu, tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat juga melemahkan posisi tawar petani Manggarai. Problem pembangunan pertanian juga terjadi karena

rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani.

Program termutakhir yang diyakini mampu menjawab persoalan ini adalah program Upsus pemerintah Jokowi-JK yang menjadikan problem seperti irigasi, distribusi pupuk, benih dan keterbatasan kapasitas penyuluh sebagai penyebab utama masalah petani di Indonesia umumnya dan Manggarai khususnya.

Gambar 5.

UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN TERSEBUT, KEMTAN TELAH MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN KUNCI, YAITU :



Sumber: Dokumen Kebijakan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm Pertanian dalam Mendukung Program Upsus Padi, Jagung, Dan Kedelai. Rakor Upsus NTT 29-30 April 2015.

Jadi, konsep dalam pembangunan sedemikian sehingga disusun untuk selalu tidak pernah mempertanyakan sistem atau struktur sebagai penyebab problem petani. Pada titik ini, pembangunan terus menjadi wacana yang hegemonik dengan

jalan terus mereproduksi pengetahuan yang kian melanggengkan praktik dominasi, eksploitasi dan subjugasi atas diri para petani.

Keempat, Pembangunan *Top Down* menuju Pembangunan Partisipatif

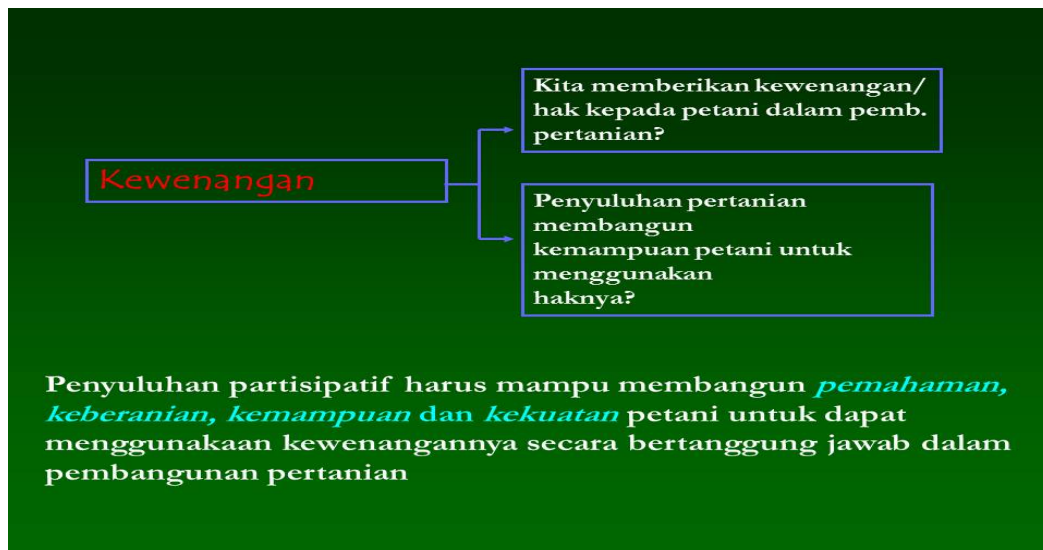
Keempat, formasi strategi mengacu pada level tema atau isi dari suatu wacana. Dengan kata lain, formasi strategi terkait hubungan antara antara penanda dan petanda yang membentuk definisi dari sesuatu. Sebagai misal, pembangunan pada masa kolonial lebih dipahami sebagai eksploitasi terhadap negara-negara jajahan, sedangkan pada era paska kolonial, pembangunan lebih diartikan sebagai upaya modernisasi bagi negara-negara dunia ketiga dengan jalan membangun infrastruktur untuk kemajuan ekonomi. Singkat cerita, formasi strategi berkaitan dengan seperti apa pembangunan digarap, yang sekaligus merupakan efek diskursif dari berubahnya kontelasi kuasa yang membentuk hubungan antara Utara dan Selatan, atau juga antara negara dengan masyarakat.

Terkait strategi pembangunan pertanian, studi ini menemukan

pergeseran strategi pembangunan dari yang sangat *state sentris* pada era Orde Baru, menuju pola pembangunan partisipatif. Sejalan dengan nafas utama desentralisasi, petani dalam hal ini menjadi subjek utama pembangunan. Pembangunan dalam hal ini tidak lagi menjadikan negara sebagai aktor kunci, tetapi masyarakat sendiri menjadi subjek penting dalam menggarap pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi dimaknai secara *top down* tetapi sepenuhnya diserahkan kepada petani sebagai subjek utama pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini salah satunya tampak dalam program penyuluhan partisipatif yang belakangan ini menjadi konsentrasi dari para PPL. Bahwasannya dalam penyuluhan partisipatif ini, seluruh program penyuluhan dalam bidang pertanian bertujuan untuk *capacity building* para petani.

Gambar 6.



Sumber: Penyuluhan Partisipatif, BPK. Kecamatan Lembor

Pembangunan partisipatif ini juga nyata dalam berbagai program pemberdayaan yang menysasar petani. Sejumlah program baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun lembaga swasta (koperasi), mendukung penuh usaha pemberdayaan petani. Salah satu bentuk program pemberdayaan petani dari pemerintah pusat adalah kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (pphp) melalui pola Bantuan Sosial (Bansos) yaitu transfer keuangan langsung ke rekening kelompok tani penerima (bdk. Doc. PPHP, 2011). Tujuan utama dari program ini adalah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan sehingga menumbuhkan rasa memiliki atas output yang dihasilkan. Selain program ini ada begitu banyak program lain seperti UPSUS dari pemerintahan Jokowi-JK yang sepenuhnya didorong untuk semakin meningkatkan kapasitas petani dalam rangka menyambut Manggarai Barat sebagai Kabupaten Pariwisata.

Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kerangka pembangunan, jargon-jargon kiri seperti partisipatif juga rentan dibajak oleh pembangunan mainstream yang bertujuan untuk semakin mengintegrasikan para petani ke dalam sistem pasar. Artinya, partisipasi yang

dimaksudkan justeru tidak sedang mempertanyakan sistem atau status quo, tetapi bagaimana sistem pembangunan dan segala prinsipnya semakin meransenk masuk ke dalam kehidupan petani. Efeknya, petani dituntut untuk semakin adaptif dengan sistem yang ujung-ujungnya mengeksploitasi mereka lebih sadis lagi.

Resistensi Subjek Dalam Wacana Pembangunan

Bagian sebelumnya telah dengan cukup panjang lebar membahas bagaimana pembangunan merepresentasikan subjek petani. Sebagai kelanjutan dari analisis tersebut, bagian ini akan menguraikan subjek petani yang melalui strategi tertentu berusaha menunjukkan perlawanan atau resistensi terhadap sistem yang ada. Studi ini mengambil dua bentuk strategi yang diusung oleh dua komunitas tani yaitu Apel (Aliansi Petani Lembor) dan Komunitas Daulat Tani Liang Sola yang selama ini mengambil jalan resiliensi di tengah sistem pembangunan

pertanian yang tidak lagi memihak mereka.

Perkembangan studi terkait resiliensi belakangan ini terpusat pada dua ketegangan besar yaitu antara memperlakukan resiliensi sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada atau justeru melihatnya sebagai adaptasi terhadap sistem yang ada. Mengikuti gagasan ini, analisis dalam bagian ini pun secara kritis menempatkan strategi resiliensi yang diusung oleh dua komunitas tani dalam dua cara baca ini. Dengan demikian, ada baiknya di bagian awal uraian ini, pemetaan studi terkait resiliensi coba dihadirkan untuk memperjelas posisi epistemologi dari analisis ini.

Resiliensi: antara Adaptasi atau Resistensi

Resiliensi (daya lentur), merupakan kata yang belakangan ini begitu populer dalam wacana pembangunan. Secara harafiah, resiliensi merupakan kata dari dunia psikologi, yang diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi bila terjadi sesuatu yang merugikan dalam hidupnya. Dalam

konteks pembangunan, resiliensi mengacu kepada cara-cara yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu untuk dapat mengatasi kemungkinan efek-efek negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan. Katrina Brown (2016: 40), misalnya, memberikan beberapa pengertian terkait resiliensi. Pertama, resiliensi merupakan strategi pembangunan untuk terus memastikan terjadinya pertumbuhan (*growth based-development strategies*). Resiliensi dalam hal ini berperan sebagai strategi pertahanan dalam menghadapi goncangan, gangguan atau berbagai perubahan global lainnya yang menghambat pembangunan. Pada point pertama ini, gangguan lebih dialamatkan kepada faktor-faktor eksternal seperti risiko bencana alam. Kedua, resiliensi diperlukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang cenderung merusak. Resiliensi, dengan demikian, lebih dimengerti sebagai strategi untuk meminimalisir potensi terjadinya kerusakan. Berbeda dengan point pertama, potensi kerusakan pada dalam hal ini tidak saja disebabkan oleh bencana

alam (*risk disaster*) tetapi juga perubahan sosial lain yang mengancam *well being* suatu masyarakat.

Seperti halnya kajian *indiginity politics*, perkembangan studi resiliensi belakangan ini pun masih berada pada ketegangan antara melihatnya sebagai bentuk resistensi atau adaptasi dengan sistem yang ada. Bahwasannya resiliensi merupakan strategi resistensi yang dilakukan oleh sekelompok rentan untuk membendung dampak buruk dari sistem yang eksploitatif. Resistansi dalam hal ini mengacu pada kekuatan, self-determinasi, agensi dan kekuasaan (Brown, 2016: 194). Di Mozambique misalnya, masyarakat menunjukkan kerentanan yaitu ketidakmampuan mereka berhadapan dengan kebijakan pemerintah dan proyek-proyek internasional yang mengancam mata pencaharian (*livelihood*) warga setempat.

Dimensi resistensi dari sebuah resiliensi terjadi ketika ia tidak terkunci pada pembacaan strategi suatu kelompok untuk bertahan dengan caranya sendiri, tetapi lebih

dari itu mereka mampu mengorganisasi diri mereka sendiri untuk mempengaruhi distribusi ekonomi yang lebih adil misalnya. Dalam hal ini, resiliensi tidak saja dilihat sebagai tampakan masyarakat yang semakin *self-resilient*, tetapi lebih dari itu resiliensi harus dilihat sebagai formasi sosial untuk sebuah upaya self-determinasi (Derickson, 2016: 164). Karakter resistensi dari sebuah resiliensi juga terjadi ketika terdapat apa yang disebut dengan *resourcefulness* (kapasitas untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom) yang dengan jalan mana suatu komunitas mempunyai kapasitas untuk mempertanyakan relasi kekuasaan yang selama ini menyebabkan terjadinya kondisi eksploitatif atas diri mereka (MacKinnon & Derickson, 2012: 263).

Sedangkan resiliensi sebagai adaptasi atau bentuk baru dari governmentalitas neoliberal oleh para penstudi *post development* dijelaskan dengan berbagai argumentasi. Cara berpikir ini dimulai ketika prinsip kompleksitas (*undetermine*), ketidakpastian

(*uncertainty*), diklaim sebagai sesuatu yang ontologis dari suatu kenyataan sosial (Chandler, 2014). Dengan demikian, cara berpikir resiliensi yang fleksibel, adaptif, *self-reflexive* merupakan jawaban yang tepat atas cara mengelolah kenyataan sosial yang kompleks. Sementara itu penjelasan lain yang mengatakan bahwa resiliensi dicurigai sebagai governmentalitas neoliberal, ketika ia dibaca sebagai upaya untuk menggeser peran pemerintah (*destatification*) dengan cara mendorong terbuka lebarnya perilaku yang bebas dari masyarakat (*free conduct*) dalam mengurus pembangunan ekonomi (Joseph, 2013: 42). Logika pasar ini kemudian beroperasi melalui cara-cara halus yang terbungkus melalui kata-kata seperti publik, partisipasi, *private patnership*, *networked governance*.

Lantas, menjadi begitu menarik ketika kata ini menjadi senjata baru ketika dibajak oleh rezim pembangunan neoliberal, untuk terus melanggengkan relasi kuasa hierarkis dalam pembangunan. Dalam discourse pembangunan neoliberal kata ini dipakai sebagai senjata

depolitisasi. Depolitisasi secara sederhana dimaknai sebagai rekayasa gagasan dalam rangka mematikan agensi subjek.

Ini baru Sungguh-Sungguh Petani

Ini baru benar-benar petani. Petani itu harus kreatif, berdaya saing dan dituntut untuk semakin bekerja keras. (wwcr. dengan Bene Pambur). Hal tersebut merupakan jawaban seorang petani sekaligus aktivis Apel ketika ditanyai bagaimana respon pemerintah atas gerakan mereka. Melalui ungkapan ini, menarik untuk membaca Apel sebagai bentuk adaptasi dengan sistem pembangunan yang selama ini eksploitatif. Apel dalam konteks ini merupakan merupakan jalan keluar yang diambil oleh petani sendiri untuk tetap bertahan dalam sistem pembangunan yang ada.

Bagaimana hal ini mungkin dijelaskan? Pertama, pujian pemerintah terhadap Apel, perlu ditempatkan dalam konteks pembayangan akan petani yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam pembangunan sebagaimana yang tertulis dalam dokumen-dokumen

kebijakan pertanian. Pada titik ini, subjek petani yang dihasrati oleh sistem pembangunan adalah petani yang berdaya saing, kreatif, reponsif, serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Artikulasi ini sekilas dibenarkan oleh testimoni Avent Turu, seorang petani yang juga aktivis Apel (wwcr. dengan Avent Turu). Bahwasannya, Apel dibentuk karena keterbatasan sumberdaya manusia yang selama ini merupakan kendala terbesar petani Lembor. Rendahnya sumber daya manusia ini ditandai oleh kegagapan petani dalam membuat analisis usaha tani. Petani di Lembor, menurut Turu, kurang memahami manajemen penghasilan dan mekanisme pengelolaan paska panen. Jelas kiranya bahwa dalam konteks ini, Apel dibaca sebagai resiliensi yaitu langkah keluar yang diinisiasi oleh petani sendiri untuk semakin kompetitif dalam sistem pasar. Jadi dengan cara baca seperti ini, alih-alih menyebut diri sebagai resistensi petani terhadap

Kedua, artikulasi pangan lokal yang diusung Apel dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem

yang ada ketika ia dibentuk sebagai antisipasi terhadap musim yang tidak menentu yang selama ini dibajak oleh bahasa pembangunan sebagai penyebab dari kegagalan petani Lembor. Isu *climate change*, belakangan ini menjadi topik yang kerap diperbincangkan pada level internasional di mana agen-agen pembangunan internasional berada pada garda terdepan dalam meniupkan isu ini. Petani kecil dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dalam perubahan iklim yang semakin tidak menentu (Concepcio, 2011: 12). Persis pada titik ini, problem petani yang sebenarnya merupakan problem struktural dieksternalisasi sebagai problem teknis.

Serupa dengan komunitas Apel, Komunitas Daulat Tani Liang Sola, yang dibentuk dalam kerjasamanya dengan CBO (Community Based Organization) Sunspirit Labuan Bajo, mengimpikan petani yang semakin semakin otonom, mandiri (*self-reliant*) dalam bertani. Jalan menuju cita-cita ini menjadikan peningkatan sumber daya manusia petani menjadi garapan utama dalam komunitas ini.

Tesis ini dibangun di atas diagnosa bahwa kegagalan pembangunan di Lembor disebabkan oleh sumber daya petani yang relatif masih sangat rendah. Lantas, persis pada titik ini, hipotesis bahwa jalan resiliensi yang ditempuh komunitas ini rentan terbajak kembali ke dalam *language game* pembangunan neoliberal yang pada dasarnya hendak dilawan oleh komunitas ini. Beberapa argumentasi berikut, setidaknya membenarkan membuat hipotesis ini menjadi tesis.

Pertama, pembangunan adalah soal partisipasi petani. Kata partisipasi bersama dengan sederetan kata yang lain seperti *sustainable development, capacity building* seakan menjadi *buzword* dalam literatur kajian pembangunan belakangan ini (Leal, 2010: 89). Dalam rezim pembangunan neoliberal, kata ini diplintir maknanya sedemikian sehingga bertujuan untuk semakin mengintegrasikan warga global ke dalam arena pasar bebas. Hal ini ditempuh dengan jalan mereduksi partisipasi sekadar sebagai persoalan teknis semata. Persis pada titik ini, problem sosial-politik semata dilihat

sebagai perkara teknis semata. Partisipasi, dengan demikian, tetap berada dalam arena *status quo* ketimbang menawarkan sebuah perlawanan terhadap sistem.

Terkait hal ini, model pembangunan partisipasi yang ditawarkan oleh Komunitas Daulat Tani Liang Sola pun rentan terbajak oleh asumsi ini. Bahwasannya penguatan kapasitas petani dalam konteks ini membuat petani semakin *self-reliant* dalam sistem pembangunan pasar. Wujud dari teknikalisis permasalahan ini sangat nyata terlihat dari bagaimana perbedaan antara pertanian organik yang menjadi fokus utama dari sekolah tani Liang Sola (bdk. Modul Sekolah Tani Baku Peduli, 2105). Bahwasannya melalui sekolah ini penguatan kapasitas petani ditempuh melalui *training* pembuatan pupuk bokasi, pupuk cair dan pestisida organik.

Kedua, jalan self determinasi komunitas Tani Liang Sola dalam arti tertentu berpotensi dibajak sistem pembangunan mainstream (neoliberal), ketika mereka berusaha menarik diri dari negara (*withdrawal*

from the state). Problem pembangunan pertanian dilihat bukan sebagai problem struktural tetapi semata dilihat sebagai problem institusi semata. Persis pada titik ini, tidak digarapnya negara sebagai institusi penting dalam pembangunan, membuka jalan yang seluas-luasnya bagi institusi pasar dalam menggarap pembangunan petani. Lagi-lagi pada titik ini, petani berpotensi kembali jatuh ke dalam jebakan pembangunan yang market-sentris yang sebenarnya hendak dilawannya.

Ketika Petani Menyadari Eksploitasi Pasar

Bagian pertama dalam arti tertentu telah menjelaskan bagaimana strategi resiliensi yang diusung oleh petani di Lembor, rentan terjebak kembali ke dalam sistem pembangunan lama yang eksploitatif. Berbeda dengan pandangan ini, komunitas Apel dan Daulat Tani Liang Sola pada sisi yang lain melalui strategi pangan lokal justeru semakin mempunyai daya tawar dalam sistem pasar yang selama ini mengeksploitasi mereka.

Komunitas Apel misalnya menjadikan pengembangan pangan lokal khususnya Sorgum, sebagai alternatif tanaman pangan di tengah sistem tanam monokultur (padi), yang sudah bertahun-tahun dijalankan selama ini. Pangan lokal menurut Apel merupakan jawaban yang tepat bagi petani Lembor, di tengah pembangunan monokultur yang selama ini membuat para petani Lembor tidak berdaulat. Hal ini pun ditegaskan dengan jelas dalam dokumen kertas kerja Apel, yang merumuskan bahwa tujuan jangka panjang didirikannya organisasi ini adalah meningkatkan kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat Lembor (Kertas kerja Apel, periode 2015/2016). Itu berarti, melalui Apel para petani ingin memenangkan dua front sekaligus yaitu kedaulatan pangan sekaligus kedaulatan ekonomi.

Pertama, melalui pangan lokal, para petani diharapkan mampu berdaulat secara pangan. Bene Pambur, seorang petani Apel misalnya, mengangakat fenomena Raskin (Beras Miskin) bantuan pemerintah sebagai ironi besar di

persawahan Lembor dalam beberapa tahun belakangan ini (wwcr. dengan Bene Pambur). Hal ini menurut si penutur merupakan pratanda bahwa stok pangan di tingkat keluarga masih sangat kurang. Dengan demikian, menurut dia, apakah Lembor masih layak disebut sebagai lumbung pangan, sementara ada banyak petani yang menangis. Di tengah krisis ini, pangan lokal bisa menjadi jawaban. Karena itu sebagai simbol kedaulatan pangan melalui Sorgum, Bene Pambur menjelaskan bahwa setiap petani Apel wajib menjadikan Sorgum sebagai makanan pokok mereka selain beras.

Kedua, pangan lokal mengimpikan petani yang berdaulat secara ekonomi. Petani Apel yang lain pun menjelaskan bagaimana garapan pembangunan pertanian di Lembor selama ini membuat para petani semakin tidak berdaulat (Sorgum, 2016). Avent Turu misalnya menjelaskan bahwa pengelolaan tanaman padi semakin sulit dipertahankan ke depannya, karena pengelolannya semakin mahal dan banyak bergantung kepada pemerintah (wwcr. dengna

Avent Turu). Untuk benih misalnya, kita harus membelinya di toko. Dalam proses ini menurut Avent, kita yang kerja, sedangkan pemilik tokoh yang kaya. Di tengah situasi seperti ini, alternatif pangan lokal yang tidak membutuhkan banyak banyak air, ramah lingkungan, tahan hama, dan relatif murah biaya menjadi jawaban di tengah situasi seperti ini. Singkat kata, alternatif pangan lokal membuat petani semakin berdaulat.

Ketiga, merangkum point pertama dan kedua, Apel lebih jauh hadir untuk mempertanyakan relasi kuasa dalam pembangunan yang selama ini melahirkan eksploitasi terhadap para petani atau yang membuat petani Lembor semakin tidak berdaulat. Artinya artikulasi kedaulatan pangan dan kedaulatan ekonomi menandakan bahwa selama ini garapan pembangunan disinyalir tidak mendatangkan kesejahteraan bagi para petani. Pada titik ini pembayangan versi lumbung pangan ala pembangunan berbeda dengan lumbung pangan ala petani. Terkait hal ini, organisasi Apel melalui beberapa petaninya, mencibir keras, pesta panen raya yang diadakan di

Lembor pada tahun 2015 yang lalu. Bagi mereka memori Lumbung pangan yang kembali didengungkan melalui momen panen raya tersebut, merupakan suatu kebohongan besar. Momen ini hanyalah bagian dari strategi pembangunan untuk tetap memberikan kesan yang positif bagi masyarakat Lembor. Bertolak dari situasi seperti ini, para petani melalui wadah Apel dalam arti tertentu sedang menunjukkan kepada para pengambil kebijakan terkait dengan apa itu pembangunan yang sesungguhnya.

Dalam semangat yang kurang lebih sama, komunitas Tani Liang Sola melalui strategi pasar komunitas, justeru mampu menawarkan posisi baru para petani di hadapan eksploitasi pasar. Arti penting sebuah resistensi terhadap struktur persis terletak pada titik ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adrianus Hasri, seorang aktivis Sunspirit yang selama ini menangani divisi pertanian di Lembor bahwa salah satu problem terbesar yang dialami oleh petani Lembor belakangan ini adalah tidak adanya sentra pemasaran produk-produk

pertanian yang adil dan *fair* (wwcr. dengan Adrianus Hasri). Di tengah kondisi seperti ini, para petani petani sering ditipu dengan harga yang ditentukan secara sewenang-wenang oleh mekanisme pasar atau sistem ijon. Bertolak dari problem petani seperti ini, komunitas Daulat Tani Liang Sola melakukan perlawanan terhadap sistem pasar bebas yang selama ini sangat eksploitatif dengan apa yang mereka sebut dengan pasar komunitas. Dalam pasar komunitas inilah petani terlibat penuh tidak hanya sampai pada tahap produksi tetapi hingga distribusi atau pemasaran. Artinya pada titik ini, pasar yang sebelumnya berkuasa penuh dalam menguasai para petani, harus melakukan negosiasi ketika berhadapan dengan para petani yang sudah mengetahui informasi pasar dengan baik.

Penutup

Praktik dominasi, eksploitasi dan subjugasi melalui pembangunan dapat dicandra dengan menjadikan epistemologi poststrukturalist yang menempatkan pembangunan sebagai wacana. Dalam konteks ini, praktik dominasi terhadap petani

berlangsung dalam reproduksi pengetahuan yang terus mendisiplinkan para petani untuk bekerja di bawah prinsip-prinsip pembangunan. Narasi petani di Lembor, Manggarai Barat NTT merupakan bagian dari narasi keterbelengguan subjek petani di bawah kuasa yang beroperasi melalui wacana pembangunan. Hal ini berlangsung di bawah cara agen-agen pembangunan merepresentasikan subjek petani.

Namun di balik cerita mengenai kepatuhan petani (*docile body*) di hadapan kuasa pembangunan, terdapat narasi lain yang memperlihatkan munculnya subjek petani yang baru. Kajian ini pun menemukan manifestasi hal tersebut dalam cerita resistensi komunitas Petani Apel dan Liang Sola di kecamatan Lembor yang dalam kajian ini dibaca sebagai subjek-subjek baru yang coba mengambil jalan alternatif di luar pembangunan *mainstream*. Namun pertanyaan kritisnya adalah sejauh mana resistensi mereka membawa perubahan bagi kehidupan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bello, W. (2009). *The Food Wars*. London and New York: Verso.
- Brown, K. (2016). *Resilience, Development and Global Change*. London & New York: Routledge.
- Chandler, D. (2014). Beyond Neoliberalism: Resilience, the New Art of Governing Complexity. *Resilience*, 2 (1), 47–63.
- Derickson, K. D. (2016). Resilience is not Enough. *City*, 20(1), 161-166.
- Erb, Maribeth. (1999). *The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles*. Malaysia: Times Editions.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.
- Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hettne, B. (2009). Thinking about development: Development Matters. London & New York: Zed books.
- Howarth, D. Norval, A.J., dan Stavrakakis, Y. (eds). (2000). *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, hegemonies, and Social Change*. Manchester: Manchester University Press.
- Jorgensenn, M. dan Philips, L.J. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Sage Publication.
- Joseph, J. (2013). Resilience as Embedded Neoliberalism: a Governmentality Approach. *Resilience*, 1 (1), 38–52.
- Kelly, M.G. (2009). *The Political Philosophy of Michael Foucault*. New York and London: Routledge.
- Korovkin, T. (1997). The Evolution of the Indigenous Peasant Economy in Northern Ecuado. *Latin American Research Review*, 32 (3), 89-110.
- Krisna, S. (2009). *Globalisation and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in Twenty-first Century*. United States of America: Rowman & Littlefield.
- Marchart, O. (2007). *Post-Foundational Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- MacKinnon, D. dan Derickson, K. D. From resilience to resourcefulness: A critique of resilience policy and activism. *Progress in Human Geography*, 37(2) 253–270.

- McHoul, A. dan Grace, W. (1993). *A Foucault Primer, Discourse, power and the Subject*. London and New York: Routledge.
- McMichael, P. (2009). *A Food Regime Genealogy*. *The Journal of Peasant Studies*, 36 (1), 139-169.
- Mubyarto. (1987). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nggoro, Adi M. (2013) *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah.
- Raharjo, M. D. (1990). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI Press.
- Stavrakakis, Y. 1999. *Lacan and the Political*. London: Routledge.
- Ziai, A. (2015). *Development Discourse and Global History, from Colonialism to the Sustainable Development Goals*. London & New York: Routledge.
- Dokumen-Dokumen**
- Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi tahun 2014. Kementerian PPN-Bappenas.
- Program Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun 2017. BPK Kecamatan Lembor.
- Dokumen Dukungan Penyuluhan dalam Upaya Khusus (upsus) Percepatan Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, Kedelai tahun 2015. BPK Kecamatan Lembor.
- Data, Bagan Organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan (Permentan No. 26/Permentan/Ot.140/4/2012) Balai Penyuluhan Kecamatan (Bpk) Lembor.
- Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Pphp) Dana Tugas Pembantuan Provinsi NTT Tahun 2011 Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. BPK Kecamatan Lembor
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur tahun 2015.
- Laporan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS Kabupaten Manggarai Barat Periode 2011. BPK Kecamatan Lembor
- LintasTimur. *Pesona NTT: Nusa TenunTangan*. EdisiJuli- Oktober 2013. Labuan Bajo: Sun Spirit.
- Modul Sekolah Tani Baku Peduli, Sunspirit Labuan Bajo (2015). Labuan Bajo, Sunspirit.

Dokumen Penyuluhan Partisipatif.
BPK. Kecamatan Lembor.

Statistik Kabupaten Manggarai
Barat, 2014.

Kecamatan Lembor dalam Angka,
2014.

Kertas kerja Apel, periode
2015/2016.

Kabupaten Manggarai Barat dalam
Angka, 2014.

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat,
2011-2015.

Internet

Sorgum, Alternatif Pangan di Lumbung
Padi, <http://sunspiritforjusticeandpeace.org/2016/04/22/sorgum-alternatif-pangan-di-lumbung-padi/>